

BAB I

PENDAHULUAN

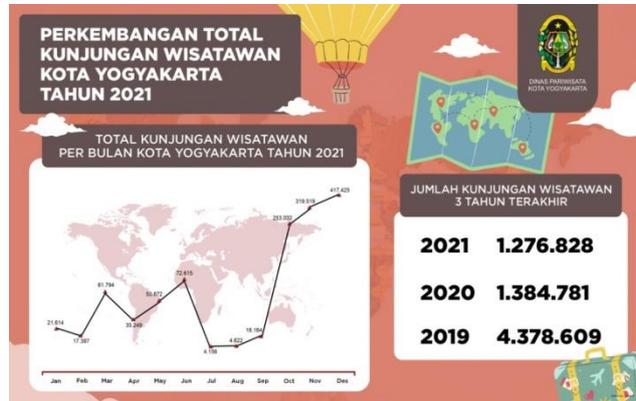
1.1 Latar Belakang

Setiap negara yang masih dalam taraf negara berkembang memiliki pola perencanaan pembangunannya tersendiri. Dalam suatu negara yang memiliki rencana pembangunan tentunya memiliki langkah taktis untuk menggapai target yang telah diabsahkan. Di negara Indonesia, terbagi menjadi dua jenis rencana pembangunan nasional. Di rezim Jokowi-Ma`ruf rencana pembangunan nasional terbagi menjadi dua, yakni rencana pembangunan jangka pendek/menengah (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) (Suzetta, 2018). Atau mungkin, kini kita telah mengenal salah satu rencana pembangunan nasional jangka panjang seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan rencana pembangunan jangka pendeknya seperti rancangan kerangka ekonomi makro, dsb. Proses pembangunan ini kerap disebut sebagai proyek yang kemudian proyek tersebut dikaji dari beberapa aspek. Contohnya, aspek kelayakan lingkungan yang dapat disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan (Maharannie, 2019). Sejatinya rencana pembangunan mempunyai maksud yang baik apabila telah menganalisa terlebih dahulu apa yang akan terjadi kemudian jika proyek tersebut direalisasikan untuk menciptakan *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibukota nya yakni Kota Yogyakarta memiliki posisi yang sangat strategis daripada kabupaten lainnya. Wilayah Kota Yogyakarta selain sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga sebagai pusat aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial budayanya. Menurut Sri Widyastuti (2020) luas wilayah Kota Yogyakarta sekitar 32,5 km² atau kurang lebih sekitar 1,02% dari luas wilayah DIY. Secara filosofis, hadirnya Kota Yogyakarta karena memiliki tumpuan pada kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jika secara mendetail hal itu mempengaruhi citra dan mampu membangun *Image* Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, Kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Pendidikan. *Image* Kota Yogyakarta terbentuk disebabkan karena semakin masifnya perkembangan fungsi dari pelayanan kota yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Kota Yogyakarta memiliki beberapa prestasi sebagai penunjang *Image* nya, antara lain seperti mendapat penghargaan Kota Cerdas tahun 2018, Kota Pelayanan Publik Terbaik 2018, Penghargaan Daerah Berprestasi, Penghargaan Adipura sejak tahun 2010 dan *Indonesian`s Atracteveness Award* 2018.

Data perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta telah mencatat perkembangan pariwisata yang begitu pesat dari tahun 2015 sekitar 5,6 juta pengunjung dan begitupun tahun-tahun seterusnya hingga tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi pandemi yang begitu dahsyat di Indonesia terkhususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya tragedi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata. Data tersebut

dapat kita lihat dibawah ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun (2021).



Gambar 1.1 Data Perkembangan Total Dari Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta Tahun 2021

Sumber : Website Pemerintah Kota Yogyakarta, 2022

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa dari tahun 2019 terdapat 4.378.609 pengunjung. Dan sayangnya, saat maraknya pandemi Covid-19 di Indonesia tepatnya pada tahun 2020 dari sisi pengunjungnya relatif menurun, dari pengunjung empat juta sekian menjadi 1.384.781 pengunjung. Setahun setelah masuknya pandemi Covid-19 ke negara Indonesia tepatnya pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta tidak kunjung meningkat, jumlahnya pun relatif menurun sebesar 1.276.828 pengunjung. Ini menandakan ditahun 2020 sampai 2021 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta menjadi sejarah pahit untuk pihak – pihak yang terdampak, terkhusus elemen masyarakat yang fokus dan mengandalkan bidang pariwisata dan perdagangan dalam mata pencaharian pokok-nya.

Beberapa uraian data diatas menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mengandalkan pariwisatanya. Dengan mengandalkan pariwisata, Kota Yogyakarta juga menopang itu dari sektor perdagangannya. Karena sektor perdagangan adalah salah satu aktivitas ekonomi yang relatif berkembang seiring berkembangnya pariwisata. Kota Yogyakarta memiliki *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dari dua sub sektor, yaitu dari perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Menurut Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun (2017), jika dipandang dari sisi pertumbuhan nilai PDRB sektor perdagangan memiliki nilai yang terus meningkat dengan nilai pertumbuhan di rentang 5,72 persen per-tahunnya. Akan tetapi, kontribusi dari sektor perdagangan pada tahun 2012 – 2016 terhadap PDRB cenderung fluktuatif dengan tren meningkat serta rata – rata pertumbuhan yang lambat yaitu sebesar 0,47 persen per-tahunnya. Data yang telah dianalisis tersebut dapat kita lihat bersama dibawah ini :

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rp	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	23.538.101,79	5,24
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Juta Rp	1.326.260,70	1.407.238,60	1.468.894,10	1.552.644,80	1.656.673,7	5,72
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,32	6,11	5,23	5,99	5,54	-2,68
4.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,91	6,95	6,95	7,01	7,04	0,47

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Gambar 1.2 Data Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Website Pemerintah Kota Yogyakarta, 2022

Malioboro yang merupakan salah satu pusat wisata dan perdagangan yang terdapat di Kota Yogyakarta, dengan seiring berkembangnya sektor pariwisata dan perdagangan di Malioboro, tepat hari Rabu, 26 Januari 2022 telah menjadi hari diresmikannya Teras Malioboro 1 dan 2 sekaligus ditetapkannya relokasi pedagang kaki lima dari sepanjang trotoar Malioboro menuju Teras Malioboro 1 dan 2. Dengan berdirinya Teras Malioboro 1 dan 2 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berharap kawasan pedestrian Malioboro yang masuk dalam sumbu filosofis Yogyakarta dapat tertata, dan juga menurut Kabag Humas Pemda DIY, yakni Ditya Nanaryo Aji dalam (Rosa, 2022). Ditya menjelaskan bahwa kawasan Malioboro akan diajukan menjadi salah satu tempat warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO.

Berdirinya Teras Malioboro 1 dan 2 tentunya juga memiliki dampak tersendiri bagi pedagang kaki lima, yang awalnya berjualan di sepanjang bahu jalan Malioboro, kini harus berdesakan dan berjualan

menjadi satu dalam satu bangunan. Salah satu pedagang kaki lima yang bernama Hari Pinuji (30 Tahun) dalam (Rahadi, 2022) berpendapat bahwa ia lebih memilih berjualan di kawasan pedestrian, karena omsetnya mengalami penurunan yang signifikan kurang lebih 95%. Untuk pengaturan posisi berjualan itu tidak bisa diatur, karena hal tersebut telah diatur dengan menggunakan sistem undian. Hari pinuji mengatakan :

“Kalau secara penataan memang lebih teratur tetapi pengunjung kurang mau apa. Jadi, kita rapi tetapi nggak ada uang bagaimana? Waktu liburan sekolah penjualan itu sama saja. Kalau terlihat dari depan memang ramai tetapi coba lihat ke belakang seperti apa keadaannya. Pengunjung Cuma didepan aja nggak bisa muter sampai belakang”.

Dengan relokasi pedagang dari sepanjang bahu jalan Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2, pemerintah memberikan janji yang akan menyejahterakan pedagang dengan cara pengunjung akan dibuat merata sampai ke belakang. Akan tetapi, realitanya hingga enam bulan terhitung dari diresmikannya Teras Malioboro tidak ada perubahan sedikitpun yang dilakukan. Dan juga dalih pemerintah untuk memindahkan PKL adalah salah satu upaya untuk penataan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta.

Selain berdampak kepada pendapatan, dampak lain yang terlihat adalah berkurangnya karyawan-karyawan. Dalam (Amin, 2022) Wijaya seorang PKL di Malioboro berpendapat bahwa kini hanya terdapat satu karyawan yang tersisa dari usaha yang dikelolanya, karena ia sudah tak mampu memberikan gaji mengingat omset yang didapatkannya tak sebanding dengan pengeluarannya. Dengan berkurangnya karyawan tentu ini menjadi permasalahan baru yang bisa menambah angka pengangguran

di Kota Yogyakarta khususnya. Selanjutnya, terdapat beberapa PKL yang mengeluhkan kepada pihak Pemprov DIY, namun mereka merespon bahwa mereka meminta waktu untuk memetakan potensi dan kondisi dari berbagai aspek. Kemudian, Pemprov DIY juga menilai bahwa bangunan Teras Malioboro masih banyak kekurangannya, terutama Teras Malioboro 2 yang masih belum layak karena dibangun secara darurat. Tentunya ini juga telah membuktikan bahwa kebijakan pembangunan Teras Malioboro disusun dengan tergesa-gesa. Maka dari itu, dengan landasan yang telah dibangun pada latar belakang, penulis mengangkat judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Teras Malioboro 1 dan 2**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan sebuah masalah yaitu :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Teras Malioboro 1 dan 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan implementasi kebijakan yang terjadi dari relokasi pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 dan 2.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat dikategorikan dalam penelitian kali ini, yakni sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hadirnya penelitian ini secara teori harapannya dapat menjadi sebuah kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta harapannya dapat menambah wawasan khususnya tentang analisis terkait implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 dan 2

1.4.2 Manfaat Praktis

Hadirnya penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi sebuah referensi bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 dan 2. Selain itu, harapannya penelitian ini juga mampu menambah wawasan para civitas akademika, pedagang kaki lima, hingga masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan penjabaran dari teori, penemuan, dan artikel-artikel lainnya yang didapatkan untuk menjadi landasan hadirnya penelitian ini. Tinjauan Pustaka dapat dikatakan sebagai analisis dan isinya berupa kritik dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Tinjauan Pustaka

juga memiliki manfaat untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung *problemsolving* dalam penelitian. Sebagai filter duplikat pembahasan, penulis menyampaikan penelitian terdahulu dengan topik yang *relate* dengan penelitian dari penulis.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Fitriana et al., n.d.)	Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif	Pemerintah surabaya memiliki inisiasi dalam pembuatan kebijakan penataan PKL yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah melibatkan masyarakat dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL seperti ketua paguyuban di tiap wilayah Surabaya. Dengan begitu, pemerintah telah menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif atau bersifat <i>top down</i> .
2.	(Hamidjoyo, 2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Study Kasus di Kecamatan Laweyan)	Terdapat pengaruh bahwa signifikansi antara komunikasi, kondisi lingkungan, dan perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Daerah Surakarta sebesar 66,22%, kondisi lingkungan ditentukan oleh variabel lain. Dengan begitu, jika terjadi peningkatan komunikasi, kondisi lingkungan, dan perilaku pelaksana, maka keberhasilan implementasi kebijakan juga akan meningkat.
3.	(Pristika & Kurniawan, 2021)	Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di	Hasil temuan dari penelitian ini adalah belum efektif, sebab tidak semua pedagang

		Provinsi Jawa Timur	berkeinginan dipindahkan ke tempat yang lebih bersih, nyaman dan aman. Selain itu, belum efektif juga disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana.
4.	(Abdul, 2019)	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima	Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor adalah <i>non-implementation</i> atau praktik yang belum terlaksana. Karena beberapa faktor penghambat yakni PKL yang menolak untuk dipindahkan serta belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk PKL.
5.	(Agustina & Octaviani, 2017)	Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan <i>Mix Use</i> di Kecamatan Jabon	Hasil penelitian ini yaitu pertama, penyusunan kebijakan telah sesuai. Kedua, penetapan kebijakan telah dilakukan secara baik dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, implementasi kebijakan pengembangan kawasan <i>mix use</i> Jabon dari tahun 2003 sampai tahun 2017 masih sebatas pembangunan jalan dan belum sesuai dengan konsep yang diciptakan.
6.	(Yunianto, 2018)	Analisis Dampak Kebijakan Nilai Tambah Mineral Indonesia Terhadap Ekspor dan Ketenagakerjaan	Hasil dari penelitian ini berorientasi pada tujuan pelaksanaan kebijakan PNT agar berjalan baik adalah penataan terhadap berbagai komponen yang selama ini dianggap menghambat dalam pelaksanaan kebijakan PNT, terkhusus berkaitan dengan koordinasi dan <i>double</i> kebijakan di antara instansi terkait.
7.	(Risal et al., 2017)	Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan	Pertambangan batubara memiliki dampak positif terhadap perekonomian sebagian kecil masyarakat di

		Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman	sekitar perusahaan, yakni dengan cara memberikan peluang kerja dan peluang usaha seperti warung makan, warung sembako dan usaha rumahan.
8.	(Hermawan, 2018)	Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia	Produk tekstil dalam negeri dihegemoni oleh harga kapas dunia dan tingkat upah, sedangkan garmen dalam negeri produksi dihegemoni oleh tingkat upah di sektor garmen.
9.	(Dian Hafizah, Dedi Budiman Hakim Harianto, 2019)	Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik <i>Equilibrium</i> Rumah Tangga Miskin di Indonesia	Elastisitas permintaan beras rumah tangga miskin Indonesia pada tahun 2016 sebesar - 0.68466 dimana tergolong pada inelastis. Kebijakan beras miskin yang telah dilaksanakan memberikan efek terjadi pergeseran titik keseimbangan dari titik keseimbangan sebelumnya dimana jumlah barang dengan demand yang banyak akan tetapi harga yang lebih rendah.
10.	(Nurana & Muta'ali, 2017)	Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning	Penelitian mengungkap terjadinya fluktuasi taraf ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 dengan nilai total <i>theil</i> kawasan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerataan ketimpangan perkembangan wilayah.
11.	(Gladis Alen Atteng, J.O.Waani, 2019)	Perspepsi Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Tempat Usaha Oleh	Implementasi kebijakan mencakup lima aspek dalam penelitian ini. Contohnya seperti lingkungan, transportasi, hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam hal tersebut

		Pemerintah Kota Manado	program untuk penataan sektor informal telah diimplementasikan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan hasil nilai signifikansi tiap-tiap aspek penelitian lebih kecil dari α (0,05) maka H_0 diterima, dan makna dari implementasi kebijakan relokasi oleh pemerintah yaitu dapat mempengaruhi persepsi pedagang kaki lima di pusat Kota Manado.
12.	(Awaeh et al., 2018)	Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung	Penelitian ini telah mengetahui Implementasi Kebijakan dari Bupati Talaud yakni tentang upaya relokasi pasar tradisional Lirung di kecamatan Lirung yang berlandaskan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal ini juga berlandaskan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015 tentang penetapan status penggunaan Badan Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
13.	(Restianto & Rahaju, 2020)	Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini menunjukkan ketetapan kebijakan ketika telah terlaksana dengan baik dan dengan berkurangnya PKL yang ada di trotoar. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ketetapan pelaksanaan kurang optimal, meski kerjasama antar stakeholders telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, dari sisi eksternal ketetapan pelaksanaan terlihat kurang baik yaitu disebabkan karena keterkaitan PKL dalam pelaksanaan relokasi tersebut.
14.	(Ningsih &	Analisis	Dalam penelitian ini

	Megawati, 2018)	Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo	mengatakan implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir tidak berhasil, beberapa pedagang tidak mau menempati bangunan lantai dua pasar. Padahal informasi kebijakan telah disampaikan dengan cukup baik dengan menginformasikan pedagang pelataran ke lantai dua pasar dapat dilakukan jauh sebelum proses relokasi.
15.	(Suprijanto, 2018)	Implementasi Kebijakan Relokasi Sebagai Stimulasi Kemandirian Usaha Sektor Mikro Pedagang Kaki Lima Kawasan Gejayan – Colombo Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Mengenai Perkembangan Usaha Pedagang Resto PKL Mrican)	Penelitian ini menemukan bahwa tindakan stabilisasi terhadap sektor usaha mikro informal dapat menjadi dilaksanakan melalui pengorganisasian sektor usaha mikro informal dalam kelompok dan diberikan fasilitas untuk membantu usaha serta modal bagi kelangsungan usaha mereka.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara general penelitian yang ditelah dilaksanakan sebelumnya dominan membahas bagaimana analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 dan 2. Adapun yang mengatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif atau bersifat *top down* dengan cara melibatkan secara langsung perwakilan PKL untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi ada juga penelitian yang mengatakan serupa

dengan penelitian ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah belum efektif dalam pembuatan kebijakan relokasi, sebab tidak semua pedagang berkeinginan dipindahkan ke tempat yang lebih bersih, nyaman dan aman. Selain itu, belum efektif juga disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam target relokasinya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus pada analisis implementasi kebijakan relokasi PKL oleh Pemprov DIY untuk menata sumbu filosofi Yogyakarta dan didaftarkan warisan tak benda ke UNESCO. Dan, penelitian ini lebih berfokus pada analisis kebijakan relokasi PKL Malioboro melalui beberapa landasan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini memiliki diskursus mengenai dinamika yang terjadi dari awal kebijakan itu diimplementasikan dan hingga kini kebijakan itu telah diimplementasikan. Adanya penelitian ini harapannya dapat menjadi trobosan baru dan pelengkap penelitian sebelumnya yang masih membahas mengenai analisis implementasi kebijakan relokasi PKL di Teras Malioboro 1 dan 2.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Menurut Amtai Alasan (2021) dalam bukunya yang berjudul “Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar”

menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diciptakan pemerintah atau lembaga berwenang agar dapat menjadi *problem solver* atau agar dapat mewujudkan harapan yang dikehendaki oleh masyarakat. Menurut Dr. Riant Nugroho (2017) kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari pemerintah sebagai konklusi dari berbagai problematika sosial dan politik yang ada hari ini. Proses perumusan kebijakan publik sifatnya sangat kompleks, hal ini disebabkan karena terdapat banyak kepentingan – kepentingan di dalamnya, banyak jenis strategi yang harus dilakukan untuk mengakomodir kepentingan – kepentingan tersebut.

Secara general, kebijakan publik terdiri dari berbagai makna (Putri & Mutiarin, 2018). Berbagai makna yang dijelaskan ilmuwan terhadap kebijakan publik sering mereduksi makna kebijakan itu sendiri. **Pertama**, saat kebijakan publik dimaknai sebagai *decision making*, maka kebijakan publik adalah keputusan yang bersifat otoritatif, termasuk keputusan untuk tidak peduli jika sesuatu itu terjadi demi tertanganinya suatu permasalahan publik. **Kedua**, kebijakan juga kerap dimaknai sebagai suatu proses dari para pencipta kebijakan publik, sehingga kebijakan publik pada akhirnya bersifat administratif dan teknokratif. Kebijakan seperti ini tidak hanya sulit untuk menjangkau kepentingan masyarakat seutuhnya,

akan tetapi kebijakan publik jika seperti itu dapat menjadi alat para pembuat kebijakan untuk memenuhi berbagai macam kepentingannya. **Ketiga**, makna kebijakan seringkali dimaknai sebagai bagian dari intervensi *socio cultural* dengan memanfaatkan beberapa instrumen untuk menyelesaikan permasalahan publik. Padahal, makna kebijakan sebagai permasalahan ter-kompleks yaitu makna kebijakan sebagai interaksi negara dan rakyatnya sebagai upaya mengatasi problematika sosial.

Makna kebijakan publik sebagai interaksi negara dan masyarakatnya akan berorientasi pada semakin kompleksnya proses pembuatan kebijakan, karena semakin dalam makna kebijakan publik, maka disitu akan semakin banyak melibatkan para aktor. Ketika pelibatan aktor diluar pemerintah hadir dalam pembuatan kebijakan itu bersifat rentan konflik, sehingga kebijakan publik dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan konflik (Suwitri, 2018).

Merumuskan kebijakan publik merupakan suatu upaya yang tidak mudah, penyebabnya adalah terlalu banyaknya aspek yang terlibat, proses dalam membuat sebuah kebijakan harusnya sebagaimana yang dikatakan oleh Richard Rose dalam Faturahman (2019) bahwa kebijakan publik hendaknya dimaknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang banyak

relasinya dan konsekuensinya bagi mereka yang saling berketerkaitan. Kebijakan tidak dapat dimaknai sebagai intervensi pemerintah terhadap publik saja, namun disitu harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah dan rakyatnya. Sebuah interaksi ideal pasti akan melibatkan partisipasi dari masyarakat, kemudian adanya akuntabilitas dari pemerintah, dan juga aktualisasi kebijakannya. Jika interaksi tersebut tercipta, dapat dipastikan dari banyak pihak yang terlibat, maka kemungkinan konflik – konflik yang diprediksi akan menjadi sebuah keniscayaan.

1.6.2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan salah satu disiplin ilmu sosial terapan yang memakai banyak metode penelitian dan argumen untuk menciptakan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka menemukan solusi dari problematika kebijakan. Dr. Joko Widodo., M.S. (2021) dalam bukunya yang berjudul “ Analisis Kebijakan Publik : Analisis Proses Kebijakan Publik “ mengatakan bahwa seperti halnya definisi kebijakan publik, analisis kebijakan publik terdapat empat konsep analisis kebijakannya, antara lain yaitu :

1. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (*cognitive activity*), yaitu merupakan aktivitas yang memerlukan

learning and think atau belajar dan berpikir. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan (*policy process*), artinya masalah kebijakan ditetapkan, didefinisikan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak didalamnya, seperti pihak yang setuju maupun tidak setuju, ataupun pihak yang dipilih maupun pemilih. Kebijakan dikatakan sentral karena kebijakan merupakan sebuah proses debat dan diskusi tentang ide yang mereka punya dan tentang solusi, masalah dan prioritasnya.

2. Analisis kebijakan sebagai bentuk dari proses kebijakan secara kolektif. Pada tahapan awal, analisis hanya bisa dilakukan secara individual. Akan tetapi, analisis mereka lebih dapat dipahami sebagai kontribusi yang terorganisir sekaligus sebagai pengetahuan kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu. Dapat semakin jelas apabila misalnya ketika seorang menteri meminta kepada penasihatnya untuk melakukan analisis dan melaporkan tentang suatu isu kebijakan. Laporan dari penasihatnya tersebut tidak dapat menjadi dasar keputusan mereka. Karena, masalah kebijakan sesungguhnya adalah publik itu sendiri. Dari publik akan menghasilkan arus informasi hasil analisis dari berbagai macam sumber. Contohnya seperti dari

laporan surat kabar, representasi kelompok kepentingan, buku dan artikel ilmiah dan sebagainya. Dengan begitu, jika analisis dilakukan secara individu pembuatan kebijakan biasanya dibuat berdasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir terhadap problematika kebijakan. Seluruh analis profesional harus memahami fakta tersebut dan implikasinya yang akan terjadi kedepannya.

3. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Hal ini memiliki makna masalah kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dari beberapa analisis. Aplikasi sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional (*conventional wisdom*) sekalipun dalam pengertian ini bukan sebagai disiplin dan hal tersebut hanya bisa dijadikan sebuah refleksi saja. Analisis bisa dijadikan sesuai dengan kebijaksanaan konvensional dan memanfaatkan sebagai aturan, tergantung pada dukungannya, namun kita tak dapat menerimanya begitu saja. Analisis kebijakan adalah reflektif, imajinatif, kreatif dan eksploratif. Tanggungjawab setiap analis adalah “memperjelas” dan merefleksikan diri semaksimal mungkin untuk membantu meningkatkan kejelasan.

4. Analisis kebijakan berkesinambungan dengan problematika publik (*public problems*). Tidak semua masalah masuk ke dalam ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan orang dalam jumlah yang banyak. Masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, tidak heran jika memperdebatkan kebijakan yang berkaitan dengan apakah permasalahan tersebut merupakan masalah publik? Artinya dalam hal ini kebijakan dapat menjadi target dari *policy action* (aksi kebijakan). Hadirnya negara pada abad ini bisa dipandang sebagai bagian dari proses yang pada awalnya merupakan *private problems* menjadi *public problems*. Maka dari itu, analisis kebijakan bisa jadi mempertimbangkan masalah pribadi dan aksi pribadi, sekalipun tidak berhubungan dengan isu atau kebijakan publik.

Analisis kebijakan merupakan analisis yang harus memperhatikan berbagai kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Dan tentunya, analisis kebijakan publik harus mengedepankan kepentingan – kepentingan publik dalam proses pembuatannya. Adapun menurut Andi

Cudai Nur (2021) ia membedakan tiga bentuk utama dari analisis kebijakan publik, yakni sebagai berikut :

1. Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis kebijakan prospektif merupakan kebijakan berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan di implementasikan. Analisis kebijakan dalam hal ini berarti suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penasihat dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif merupakan penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Ada tiga tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis, yaitu seperti analisis yang orientasinya berdasarkan pada disiplin, analis yang orientasinya pada masalah, dan analis yang orientasinya pada aplikasi. Tentu dari ketiga tipe tersebut analisis retrospektif terdapat kelemahan dan kelebihan.

3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi adalah bentuk analisis yang menyatukan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian

pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak mewajibkan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, akan tetapi juga menuntut para analis untuk terus menciptakan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Kebijakan publik merupakan sebuah landasan untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya, karena mengingat secara fundamental upaya pembangunan adalah untuk membangun potensi manusia yang nantinya akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pendidikan memiliki filosofi yang dijiwai oleh cita – cita luhur. Dalam konotasi ini filosofi kebijakan pendidikan harus dijadikan pedoman dalam mempraktikkan setiap kebijakan publik. Maka dari itu kebijakan yang berpihak sangat diperlukan dari berbagai pihak terkait, terkhusus pemerintah yang berorientasi pada dana atau anggaran terhadap negara.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Daniel Masmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam (Suprijanto, 2018) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dari kebijakan dasar, kerap dalam bentuk Undang – Undang umum, bisa juga dalam bentuk perintah ataupun

keputusan eksekutif yang paling krusial atau keputusan dari badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dimitigasi, menyebutkan tujuan maupun target yang akan dituju dan juga beberapa cara untuk menstrukturisasi atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Merille Grindle (1980) dalam (Asna, 2019) implementasi kebijakan adalah penetapan kebijakan yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Yuliah, 2020) adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat ataupun suatu kelompok pemerintah yang diarahkan pada orientasi tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn telah mengembangkan model implementasi kebijakan sebagaimana terkandung dalam variabel bebas berupa ukuran dan tujuan dari kebijakan, sifat badan pelaksana, komunikasi dengan beberapa organisasi, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik.

Terdapat beberapa model-model implementasi kebijakan menurut Asna (2019) antara lain seperti :

1. Model George Edwards III

Edwards III (1980) mempertimbangkan dan menawarkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

- a. *Resources*, ini merupakan faktor sumber daya yang mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud antara lain seperti sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, sumber daya keuangan, maupun sumber daya informasi.
- b. *Bureaucratic structure*, dalam hal ini implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif dikarenakan adanya non-efisiensi hirarki birokrasi. Hirarki birokrasi mencakup aspek beberapa lembaga atau badan didalamnya. Maka dari itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

- c. *Disposition or attitudes*, dalam konteks ini keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, akan tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan sebuah kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga yang menjadi tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik.
- d. *Communication*, ini merupakan sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan, yang artinya komunikasi kebijakan merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Adapun berbagai dimensi dalam komunikasi kebijakan seperti dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi.

Dari keempat faktor implementasi diatas, implementator menganggap itu krusial dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor itu saling berhubungan satu sama lainnya, berarti jika tidak ada satu faktor, maka faktor lainnya akan

terhegemoni dan kemudian berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

2. Model Meter dan Horn

Model yang dikenalkan oleh kedua tokoh ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Ada beberapa variabel yang dicanangkan sebagai variabel yang dapat menghegemoni dan menyangkut proses kebijakan publik antara lain seperti:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- c. Kecenderungan *disposition* dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan dari berbagai faktor. Suatu kebijakan mengaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

3. Model Mazmanian dan Sabatier

Model dari kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Sabatier, mereka mengenalkan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel, antara lain seperti :

- a. Variabel Independen, artinya mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan masalah teknis pelaksanaan.
 - b. Variabel Interventing, merupakan variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis antar lembaga pelaksana, dsb.
 - c. Variabel Dependen, yakni merupakan tahapan proses dengan lima tahapan, antara lain dari pemahaman lembaga, kepatuhan objek, hasil nyata, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.
4. Model Hogwood dan Gun

Model dari Hogwood dan Gun menjelaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat antara lain seperti :

- a. Syarat pertama, adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Syarat kedua, untuk melaksanakannya perlu sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, paduan sumber yang dibutuhkan harus benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- f. Syarat keenam, hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan, tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

- j. Syarat kesepuluh, pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan sempurna.

5. Model Merilee S. Grindle

Model Grindle dapat ditentukan dengan isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya yaitu setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dapat dilaksanakan. Pada model Grindle tingkat keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh *implementability*. Kebijakan tersebut berisi :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Pelaksanaan program.
- f. Sumber daya yang dikeluarkan.

Kemudian, konteks implementasinya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diciptakan pemerintah atau lembaga berwenang agar dapat menjadi *problem solver* atau agar dapat mewujudkan harapan yang dikehendaki oleh masyarakat.

1.7.2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan salah satu disiplin ilmu sosial terapan yang memakai banyak metode penelitian dan argumen untuk menciptakan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka menemukan solusi dari problematika kebijakan.

1.7.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dari kebijakan dasar, kerap dalam bentuk undang-undang umum, bisa juga dalam bentuk perintah ataupun keputusan eksekutif yang paling krusial atau keputusan dari badan peradilan.

1.8 Definisi Operasional

Menurut Merilee S. Grindle (1980) implementasi kebijakan akan ditentukan oleh isi dari kebijakan dan apa saja konteks implementasinya.

Setelah kebijakan tersebut di transformasikan kepada target kebijakan, barulah implementasi kebijakan tersebut dapat dijalankan. Keberhasilannya dapat ditentukan dengan dua faktor, antara lain sebagai berikut:

Tujuan	Variabel	Parameter
<p>Menjelaskan analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 dan 2</p>	<p>Keterlaksanaan <i>(Implementability)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan c. Derajat perubahan yang diinginkan d. Kedudukan pembuat kebijakan e. Pelaksana program f. Sumber daya yang dikerahkan
	<p>Konteks Implementasi <i>(Context of</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kekuasaan, kepentingan, dan

	<i>Implementation)</i>	strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik lembaga penguasa c. Kepatuhan dan daya tanggap
--	------------------------	---

Tabel 1.2 Definisi Operasional

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan memprioritaskan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara penelitian dengan fenomena yang akan diteliti (Dr. Farida Nugrahani, 2008).

Menurut M. Rahardjo (2010) manfaat dari analisis kualitatif adalah mengasah kemampuan individu untuk memahami atau menerjemahkan gejala – gejala sosial, sehingga penelitian kualitatif tidak berupaya untuk mencari relasi antar gejala sosial yang satu dan lainnya. Analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif

menjadi salah satu pilihan peneliti untuk melihat dampak relokasi pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 dan 2.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Teras Malioboro 1 dan 2, karena lokasi ini merupakan salah satu objek yang terdampak dari kebijakan relokasi oleh Pemprov DIY.

1.9.3 Unit Analisa

Berdasarkan penjabaran diatas, maka unit analisa yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah beberapa *stakeholders* pelaksana serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling krusial dalam sebuah penelitian, yang mana tujuan utama dari sebuah penelitian yaitu untuk memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai aturan dan sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.9.4.1 Wawancara

Wawancara menjadi suatu komponen penting dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mendapatkan data yang akan ditransformasikan dalam bentuk kalimat. Menurut Nanda Suliandi (2017) wawancara merupakan satu dialektika dengan maksud tertentu. Dialektika tersebut terjadi dengan adanya dua pihak yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (*interviewee*) selaku pihak yang memberi tanggapan dari pertanyaan yang dilakukan. Hasil dari wawancara dari peneliti nantinya akan digunakan sebagai salah satu data dalam memproses penelitian ini.

Informan	Jabatan	Nama	Data
Dinas Koperasi dan UKM DIY	Kasubag Tata Usaha Balai Layanan Bisnis	Bapak Aribowo, S.Pi., M.Eng.	Kebijakan Relokasi
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Malioboro	Kasubag Tata Usaha	Bapak Rianto	Kebijakan Relokasi

Paguyuban Padma	Ketua Paguyuban Padma	Ibu Yati	Dampak Kebijakan Relokasi
Paguyuban Tri Dharma	Anggota Paguyuban Tri Dharma	Bapak Sukir	Dampak Kebijakan Relokasi

Tabel 1 3 Data Informan

1.9.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi sebagai salah cara untuk mengambil gambar menjadi salah satu pilihan penulis untuk melakukan penelitian ini. Dalam (Mar'atusholihah et al., 2019) dijelaskan bahwa dokumentasi merupakan suatu catatan bergambar yang berkaitan dengan suatu hal yang telah terjadi, serta hal ini dapat membuktikan sebuah fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan dalam bentuk dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data dari catatan, dokumen, file, ataupun lainnya yang telah didokumentasikan.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagian besar berasal dari website resmi pemerintah yang menjadi objek penelitian dari peneliti. Kemudian, terkait data – data *ter-update* dari kebijakan relokasi PKL Malioboro banyak mengambil dari beberapa literatur media berita aktual.

1.9.5 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Nanda Suliandi, 2017) analisis data dalam penelitian kualitatif menjadikan objektifitas data sebagai salah satu instrumen dengan memberikan kesempatan luas kepada objek untuk menyampaikan sebuah informasi. Analisis data berorientasi kepada suatu temuan yang kemudian mengkonstruksikan temuan ke dalam bentuk satuan yang dapat dikelola menjadi informasi penting. Dari analisis ini nantinya akan diperoleh kesimpulan terhadap objek penelitian, sehingga bermanfaat dalam penguatan data dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1.9.5.1 Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan secara

tertulis dilapangan. Ahmad Rijali (2019) menjabarkan secara rinci terkait reduksi data. Ia berpendapat bahwa reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, memilah, mengarahkan, menggolongkan dan mengorganisir data dengan sedemikian rupa, sehingga mendapatkan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

1.9.5.2 Penyajian Data

Selanjutnya, yang dilakukan setelah mereduksi data yakni menyajikan data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Febrianto (2017) telah menjelaskan bahwa penyajian data yang baik menjadi salah satu cara utama untuk analisis kualitatif yang valid dalam bentuk jaringan, grafik, matrik, dan bagan.

1.9.5.3 Menarik Kesimpulan

Menurut Margaretha Sumarwati (2021) langkah menarik kesimpulan mengemukakan temuan baru yang belum pernah ada atau menarik kesimpulan yang sudah ada dengan cara memilih data yang dapat menjawab

permasalahan yang ada agar didapatkan kesimpulan yang valid.